

terhadap implementasi dana desa atau dana lainnya yang dikelola oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdillah, M. (2015). *Islam dan Demokrasi: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 166–1993*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad, D., & Prayudi. (2019). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ashiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Astomo, P. (2014). *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Didik, S. (2010). *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.
- Dermawan, F. (2020). *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*. Banyumas: PM Publisher.

- Efriza. (2014). *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, Dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Huda, N. (2012). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Huda, N. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Huda, N. (2017). *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* Yogyakarta: UII Press
- Hakim, A. A. (2015). *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hilmi, M. (2014). *Islam, Politik dan Demokrasi: Pergulatan Antara Agama, Negara Dan Kekuasaan*. Surabaya: Imtiyaz.
- Harjono. (2009). *Transformasi Demokrasi*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Irma, M, A. (2017), *Kajian Tentang Parlemen*, Malang, UB Press.
- Joenarto. (1984). *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kartohadikoesoemo, S. (1984). *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahfud, M. D. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mahfud, M. D. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mahfud, M. D. (1999). *Hukum Dan Pilar-Pilar Konstitusi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Muntoha. (1998). *Fiqh Siyash: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Mushoffa, A., & Fahrurroji. (2016). *Konsep Memperdalam Demokrasi: Dari Prosedural ke Substantif, Menuju Representasi Politik yang Berkualitas*. Malang: Intrans Publishing.
- Sarja. (2016). *Negara Hukum: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Suhartono. (2000). *Parlemen Desa: Dinamika DPR Kalurahan dan DPRK Gotong Royong*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Susanti, M. H. (2017). *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

B. TUGAS AKHIR/SKRIPSI

- Haryadi, D. D. (2016). *Perbandingan Pengaturan Fungsi Pengawasan Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 6 Tahun 2014* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia). Yogyakarta.
- Rachman, A. F. (2019). *Politik Hukum Pengaturan Badan Perwakilan Desa (Studi Perbandingan antara BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dengan*

UU No. 6 Tahun 2014) (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia). Yogyakarta.

C. JURNAL

Kampus, Y. N., & Zainal. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(3), 365–377. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/18039>.

Widia, R., & Syahfitri, D. I. (2024). Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Lebin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(9), 127–148. <https://doi.org/10.572349/neraca.v2i9.2311>.

Telaumbanua, G. R., Waruwu, S., & Lase, D. (2022). Analisis Kinerja Kepala Desa dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 303–311. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.45>.

Rambe, M (2021). Komparasi Antara Konsep *Syura* dan Demokrasi Dalam Politik Islam. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 5 (1), 139. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3313>.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN
Tahun Anggaran 2024 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Desa

Risalah Sidang Tahun 2003/2004 DPR RI Panitia Khusus RUU tentang
Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

